

PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Susi Ardiyani¹⁾, Sri Hartati²⁾, Ardiyan Natoen³⁾, Apriliriansyah Hadi⁴⁾

Politeknik Negeri Sriwijaya
susi_ardiyani_1959@yahoo.co.id

Abstrack

This study aims to determine the role of internal audit on the implementation of good governance in South Sumatra Province. This data is obtained from questionnaires distributed to internal audit in Inspectorate of South Sumatera Province. The findings of this study indicate that the influence of each variable role of internal audit research simultaneously shows that independent variables namely Indenpendensi and Competence significantly positive effect on the application of Good Government Governance. Meanwhile, Internal Audit Program variables, Implementation of Audit Pogram and Internal Audit Report has no significant positive effect on the implementation of Good Government Governance. The results of the research show that the independent variable has a significant positive effect on the implementation of Good Government Governance. The result of the research shows that the Competence variable has a significant positive effect on the application of Good Government Governance. The result of the research shows that the variable of Internal Audit Program has a significant positive effect on the implementation of Good Government Governance. The result of the research shows that the variable of Implementation of Audit Program is not realiable so it is not included in linear regression test. So it can be said that the variable Implementation of Audit Program has no significant positive effect on the implementation of Good Government Governance. Internal Audit Report partially has a significant positive effect on the dependent variable of Good Governance implementation.

Keywords: *Internal Audit, Good Government Governance, South Sumatera*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan audit internal terhadap penerapan *good government governance* di Provinsi Sumatera Selatan. Data ini diperoleh dari kuisioner yang disebarkepada audit internal di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan . Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari masing-masing variabel peranan audit internal penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Indenpendensi dan Kompetensi secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*. Sedangkan, variabel Program Audit Internal, Pelaksanaan PogramAudit dan Laporan Audit Internal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variable Independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Kompetensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Program Audit Internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Program Audit tidak realiable sehingga tidak di ikut sertakan dalam pengujian regresi linier. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pelaksanaan Program Audit tidakmemilikipengaruhpositifsignifikanterhadappenerapan*Good Government Governance*. Laporan Audit Internal secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen penerapan*Good Government Governance*.

Kata Kunci : *Audit Internal, Good Government Governance, Sumatera Selatan*

1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada hakikatnya merupakan pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai

dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah tersebut. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1 menyatakan bahwa "Keuangan Daerah adalah

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dalam uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut". Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1). Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, terdiri atas: (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2) Inspektorat Jendral (Itjen), (3) Inspektorat Pemerintah Provinsi, (4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pengawasan Intern Pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance*, dan *clean government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini.

Berikut opini laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dapat dilihat di tabel 1 mengenai opini laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2015 dibawah ini:

Tabel 1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Opini LKPA TA
1.	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4.	2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)
5.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia, 2017

Berdasarkan peningkatan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh Intansi termasuk Inspektorat mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, opini audit BPK tersebut tidak membuat oknum-oknum berhenti melakukan korupsi. Kejaksaaan Agung menetapkan satu orang pejabat serta satu mantan pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terkait dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial pada 2013 dengan dua tersangka pada kasus ini masih

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kasus dugaan korupsi dana hibah dan Bansos Provinsi Sumatera Selatan mulai diselidiki Kejaksaaan Agung setelah menemukan adanya perubahan anggaran. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi dari APBD untuk hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun, namun diubah menjadi sebesar Rp 2,1 triliun. Selain itu, selama perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan, peruntukan fiktif, dan ketidaksesuaian peruntukan. Atas dugaan korupsi ini, negara diindikasikan merugi sebesar Rp 2,3 triliun (Sumber: Palembang.tribunnews.com, di akses 18 April 2017).

Kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang menuntut adanya partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, saling keterkaitan sesuai dengan prinsip dasar yang dikemukakan oleh *United Nation Development*. Dengan demikian penerapan konsep pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri sehingga dibutuhkan peranan inspektorat guna menjalankan fungsi pengawasan atas efisiensi dan efektifitas kerja sistem pengendalian manajemen yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Hal ini perlu dilakukan karena sebagai Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya, dan bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kinerja, pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga hal ini perlu dilakukan dengan menerapkan *good government governance* yang didalamnya mencakup partisipasi, transparansi, *responsive*, *fairness*, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta bervisi strategis.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Amaliah (2014) dan Payangan (2016) dengan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Amaliah (2014: 67) dengan hasil Peranan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good government governance*, hal ini terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan. Inspektorat berperan penting terhadap penerapan *good government governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, penelitian Payangan (2016: 72) dengan hasil Peranan dari inspektorat daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Maros. Peranan inspektorat dalam menerapkan *good government governance* sudah diterapkan secara efektif dimana posisi inspektorat pada Kabupaten Maros telah diperhitungkan dan adanya pemberdayaan yang maksimal atas kemampuan pegawai inspektorat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah indenpendensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit dan laporan audit internal secara simultan berpengaruh terhadap *Good Government Governance*?
- b. Apakah indenpendensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit dan laporan audit internal secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance*?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji secara simultan pengaruh indenpendensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit dan laporan audit internal terhadap *Good Government Governance*.
- b. Untuk menguji secara parsial pengaruh indenpendensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit dan laporan audit internal terhadap *Good Government Governance*.

2. TELAAH LITERATUR

Audit Internal

Menurut Mulyadi (2008:29) Auditor Internal auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi

Fungsi Audit Internal

Konsorsium organisasi profesi Audit Internal dalam bukunya “Standar Organisasi Profesi Audit Internal” dalam Fitriany (2015), mengemukakan fungsi audit internal yaitu membantu organisasi dalam memelihara engendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektifitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Pengertian *Good Government Governance*

Menurut Amaliah (2014:14-15) Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep *good governance* harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

Definisi dan Fungsi Inspektorat

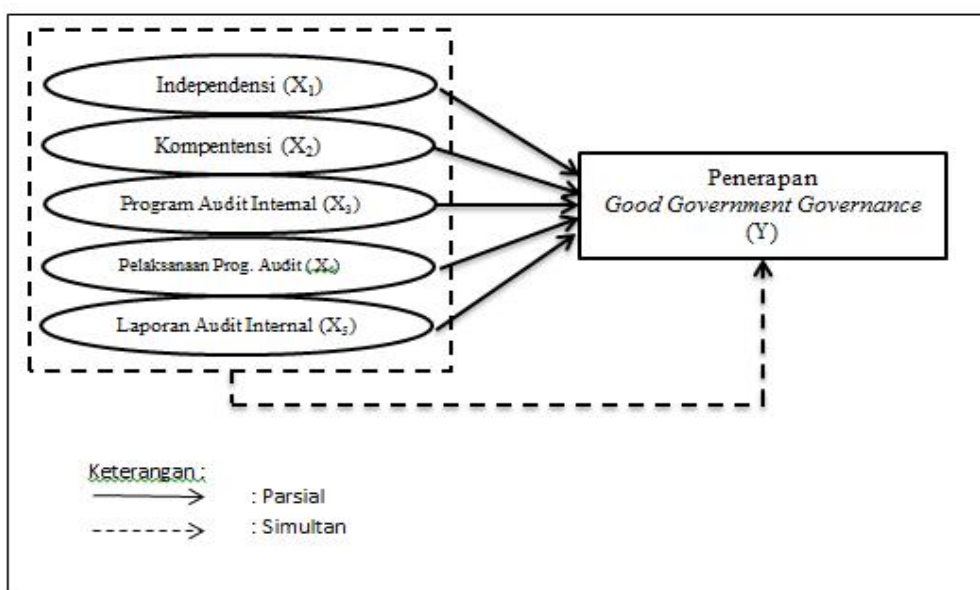
Inspektorat jenderal adalah unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur

jenderal. Tugas dan fungsi itjen bervariasi antar kementerian. Namun pada umumnya, inspektorat jenderal menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan/pemeriksaan; serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap semua pelaksanaan tugas unsur kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Tujuan utama dari kerangka penelitian adalah memberikan arah dan fokus penelitian secara efektif yang didasarkan pada hasil kajian teoritik dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Manfaat utama dari kerangka penelitian yang jelas adalah peneliti dapat dengan jelas membangun hipotesis-hipotesis penelitian yang akan diuji



Sumber : Data yang diolah, 2017

Gambar 1
Kerangka Penelitian

3.METODE PENELITIAN

Variabel Independen

Variabel Independen disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono (2016) “variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dalam hal ini variabel independennya ada Independensi, Kompetensi, Program Audit Internal, Pelaksanaan Program Audit dan Laporan Audit Internal.

a. Independensi (X₁)

Independensi merupakan kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatan (Imansari dkk, 2016). Independensi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai X₁. Pertanyaan di dalam variabel independensi

terdiri dari 5 item yang terdiri dari beberapa indikator. Setiap item diberi skor 1 sampai 5 dengan menggunakan skala interval sebagai skala pengukuran, skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skor 3 menunjukkan Netral (N), skor 4 menunjukkan Setuju (S), dan skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).

b. Kompetensi (X₂)

Kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008,84). Kompetensi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai X₂. Pertanyaan di dalam variabel kompetensi terdiri dari 3 item yang terdiri dari beberapa indikator. Setiap item diberi skor 1 sampai 5 dengan menggunakan skala interval sebagai skala pengukuran, skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skor 3 menunjukkan Netral (N), skor

- 4 menunjukkan Setuju (S), dan skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).
- c. Program Audit Internal (X_3)
Program audit adalah serangkaian rencana tindakan auditor berisikan pekerjaan apa yang harus diselesaikan, tes audit dan prosedur apa yang harus diikuti, siapa saja yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan (<http://www.belajarakuntansionline.com/pengertian-audit-program-dan-tujuan-audit-program/>, diakses 3 juli 2017). Program Audit Internal dalam penelitian ini dinyatakan sebagai X_3 . Pertanyaan di dalam variabel ini terdiri dari 3 item yang terdiri dari beberapa indikator. Setiap item diberi skor 1 sampai 5 dengan menggunakan skala interval sebagai skala pengukuran, skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skor 3 menunjukkan Netral (N), skor 4 menunjukkan Setuju (S), dan skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).
- d. Pelaksanaan Audit Internal (X_4)
Konsorsium organisasi profesi Auditor Internal Indonesia menyatakan audit internal yang sepenuhnya mengikuri definisi yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Inc.* (IIA) dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Pokok Audit Internal*: “Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.” Pelaksanaan audit internal dalam penelitian ini dinyatakan sebagai X_4 . Pertanyaan di dalam variabel ini terdiri dari 3 item yang terdiri dari beberapa indikator. Setiap item diberi skor 1 sampai 5 dengan menggunakan skala interval sebagai skala pengukuran, skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skor 3 menunjukkan Netral (N), skor 4 menunjukkan Setuju (S), dan skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).
- e. Laporan Audit Internal (X_5)
Laporan audit adalah laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan. Laporan audit internal dalam penelitian ini dinyatakan sebagai X_5 . Pertanyaan di dalam variabel ini terdiri dari 4 item yang terdiri dari beberapa indikator. Setiap item diberi skor 1 sampai 5 dengan menggunakan skala interval sebagai skala pengukuran, skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), skor 3 menunjukkan Netral (N), skor 4 menunjukkan Setuju (S), dan skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS).

Variabel Dependen

Variabel Dependen disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016) “Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Penerapan *Good Government Governance* (Y). Secara umum prinsip-prinsip dasar *Good Government Governance* terdiri dari lima hal, yaitu; transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Populasi

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Populasi responden dalam penelitian ini ada 48 orang audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

Sampel

Sampel dalam suatu kegiatan penelitian adalah mewakili dan dijadikan responden subjek penelitian atau yang akan diteliti dan dijadikan responden penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016) menyatakan bahwa: Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Sampling Jenuh*. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 responden, maka metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi, yaitu pada 48 orang audit internal pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*

Test untuk melakukan uji normalitas data dengan taraf signifikansi 5%. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Selain itu, peneliti juga menggunakan uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual*. Berikut ini hasil uji normalitas:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,29080109
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,061
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		,360
Asymp. Sig. (2-tailed)		,999

a. Test distribution is Normal.

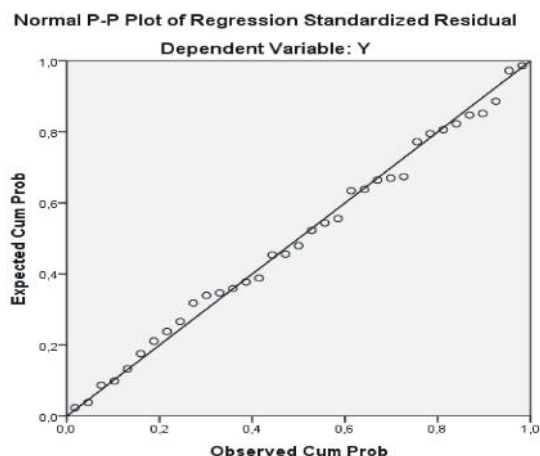
b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,999. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal.

Dari gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Hasil

penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari uji *Kolmogorov Smirnov*.



Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Gambar 2
Diagram Normal P-P Plot of regression standardized residual

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Metode uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Berikut hasil uji multikolinieritas :

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1,537	,776		1,981	,056		
	SAKD	-,350	,166	-,299	-2,106	,043	,630	1,588
	Aktv. Pengendalian	,506	,174	,437	2,900	,007	,562	1,780
	Kualitas AP	,432	,135	,454	3,204	,003	,634	1,577

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah

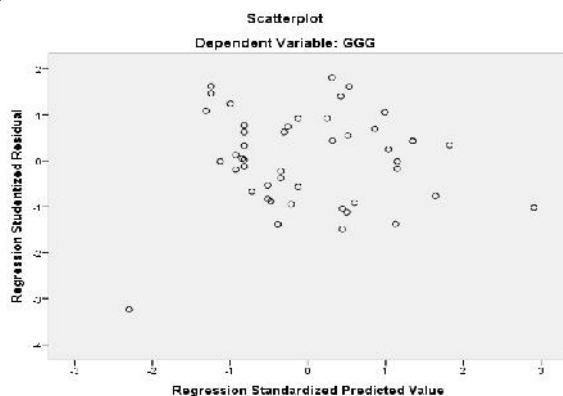
Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tolerance untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Penelitian ini menggunakan Grafik *scatterplots* untuk melihat

apakah pada model regresi terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Berikut ini grafik *scatterplots* disajikan pada Gambar 3.



Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Gambar3, Diagram *Scatterplot* Heterokesiditas

Dapat dilihat bahwa diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Atau dengan kata lain *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebarkan), maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) (Priyatno, 2012). Berikut hasil uji autokorelasi :

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,658 ^a	,433	,366	,34565	2,118

a. Predictors: (Constant), LPAI, INDP, PLAI, KMPT, PRAI

b. Dependent Variable: GGG

Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil Durbin-Watson sebesar 2,118, sedangkan dari hasil tabel DW dengan signifikan 0,05 dengan jumlah data $n = 48$ dan jumlah variabel independen $k=5$ menghasilkan nilai DL sebesar 1,3167 dan DU sebesar 1,7725, sesuai dengan kriteria $DU < DW < 4 -$

DU ($1,7725 < 2,118 < 2,2275$) maka dapat disimpulkan pada penelitian tidak terjadi autokorelasi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Ringkasan hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,656 ^a	,430	,377	,34238	2,140

a. Predictors: (Constant), LPAI, INDP, PRAI, KMPT

b. Dependent Variable: GGG

Sumber : Output SPSS diolah 2017

Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah nilai R yang ada pada tabel 5 di atas hasil perhitungan statistik diperoleh nilai R sebesar 0,656 yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara variabel Independensi, Kompetensi, Program audit internal, Pelaksanaan audit internal dan Laporan audit internal karena nilai mendekati 1. Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian ini

nilai yang digunakan adalah nilai *adjusted R^2* . Nilai *adjusted R^2* sebesar 0,377, hal ini berarti 37,7% variasi penerapan *Good Government Governance* dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel Independensi, Kompetensi, Program audit internal, Pelaksanaan audit internal dan Laporan audit internal. Sedangkan sisanya ($100\% - 37,7\% = 62,3\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Uji F (Simultan)

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen. Dalam pengujian simultan variabel independen yaitu: Independensi (X₁), Kompetensi (X₂), Program audit internal (X₃) dan Laporan audit internal (X₅) ditetapkan ketentuan bahwa jika F-hitung > F-tabel maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen (X₁, X₂, X₃, X₅) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen penerapan *Good Government*

(Y). Nilai Ftabel dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat Signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 5, dan df 2 (n-k-1) atau 48-5-1 = 42 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk Ftabel sebesar 2,594 (lihat pada lampiran uji F). Hasil dari pengujian simultan (Uji F) pada keseluruhan variabel-variabel independensi dalam penelitian ini akan dijelaskan melalui tabel dan pembahasan berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,809	4	,952	8,124	,000 ^b
	Residual	5,041	43	,117		
	Total	8,850	47			

a. Dependent Variable: GGG

b. Predictors: (Constant), LPAI, INDP, PRAI, KMPT

Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat nilai F-hitung adalah sebesar 8,124 dan signifikansi sebesar 0,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa F-hitung sebesar 8,124 lebih besar dari F-tabel 2,594, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen : Independensi (X₁), Kompetensi (X₂), Program audit internal (X₃) dan Laporan audit internal (X₅) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen penerapan *Good Government Governance* (Y).

Kompetensi (X₂), Program audit internal (X₃) dan Laporan audit internal (X₅) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil output regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t hitung dan signifikansinya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_5X_5 + e_i$$

Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial (Uji t) terhadap masing-masing variabel independen: Independensi (X₁),

Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini

Tabel 7
Hasil Regresi Linear

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,900	,636		1,415	,164
	INDP	,384	,104	,444	3,683	,001
	KMPT	,289	,122	,370	2,373	,022
	PRAI	-,038	,100	-,056	-,385	,702
	LPAI	,162	,155	,151	1,044	,302

a. Dependent Variable: GGG

Sumber : Output SPSS diolah 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 0,900 + 0,384X_1 + 0,289X_2 - 0,38X_3 - 0,162X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas menunjukkan koefisien regresi untuk 1 dan 2 bernilai positif dan yang bernilai negative 3 dan 5. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas apabila ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan

pada variabel terikatnya dan apabila diturunkan akan menimbulkan penurunan pada variabel terikat.

Dalam melihat signifikansi tiap variabel, maka dapat dilakukan dengan melihat dari nilai t-hitung dan t-tabel setiap variabel X. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka secara individual (parsial), variabel X dapat dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan jika nilai t-hitung < t-tabel maka variabel X secara individual

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai t-tabel dicari pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $48-5-1 = 42$. Hasil diperoleh untuk t-tabel sebesar 2,018/-2,018. Penerimaan hipotesis juga dapat dilihat dari nilai signifikansi setiap variabel independen. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau 5% maka hipotesis dapat diterima. Hasil uji parsial (t) dapat dilihat dalam tabel dan penjelasan berikut:

Tabel 8
Hasil Signifikansi Nilai t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,900	,636		1,415	,164
1 INDP	,384	,104	,444	3,683	,001
KMPT	,289	,122	,370	2,373	,022
PRAI	-,038	,100	-,056	-,385	,702
LPAI	,162	,155	,151	1,044	,302

a. Dependent Variable: GGG

Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat nilai t-hitung dan derajat signifikansi tiap variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_5) yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (Uji t) secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 0,900% artinya jika faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas auditor nilainya adalah 0 maka pengaruhnya positif.
- Pada variabel Independen (X_1) nilai t-hitung sebesar 3,683 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,018, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Independen (X_1) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 maka dapat dinyatakan bahwa Independen (X_1) yang dilaksanakan oleh Audit Internal Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah sebesar 0,1%. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa Independen (X_1) berpengaruh positif dalam penerapan *Good Government Governance* (H_1) dapat diterima.
- Pada variabel Kompetensi (X_2) nilai t-hitung sebesar 2,373 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,018, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kompetensi (X_2) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen *Good Government Governance* (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,22 maka dapat dinyatakan bahwa Kompetensi (X_2) yang dilaksanakan oleh Audit Internal Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance* (H_2).

- Pada variabel Program Audit Internal (X_3) nilai t-hitung sebesar -0,382 lebih besar dari nilai t-tabel 2,018, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Program Audit Internal (X_3) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen penerapan *Good Government Governance* (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,702 maka dapat dinyatakan bahwa Program Audit Internal (X_3) yang dilaksanakan oleh Audit Internal tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap penerapan *Good Government Governance* (H_3).
- Pada variabel Laporan Audit Internal (X_5) nilai t-hitung sebesar 1,044 lebih besar dari nilai t-tabel 2,018, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Laporan Audit Internal (X_5) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen penerapan *Good Government Governance* (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,302 maka dapat dinyatakan bahwa Laporan Audit Internal (X_5) yang dilaksanakan oleh Audit Internal tidak berpengaruh dengan arah negative terhadap penerapan *Good Government Governance* (H_5).

Pembahasan **Independensi dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada variabel Independen (X_1) nilai t-hitung sebesar 3,683 lebih besar dari nilai t-tabel 2,018, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Independen (X_1) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen penerapan *Good Government Governance* (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 maka dapat dinyatakan bahwa Independen (X_1)

yang dilaksanakan oleh Audit Internal Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah sebesar 0,1%. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa Independen (X_1) berpengaruh positif dalam penerapan *Good Government Governance* (H_1) dapat diterima. Sedangkan, Pada variabel Kompetensi (X_2) nilai t-hitung sebesar 2,373 lebih besar dari nilai t-tabel 2,018, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kompetensi (X_2) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen *Good Government Governance* (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,22 maka dapat dinyatakan bahwa Kompetensi (X_2) yang dilaksanakan oleh Audit Internal Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance* (H_2).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amaliah (2014) menyatakan Peranan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good government governance*, hal ini terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan. Hasil yang sama juga didukung oleh Payangan (2016) hasil penelitiannya signifikan terhadap penerapan *good governance* pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Maros. Hasil penelitian Wahyunii (2013) juga membuktikan berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kasus-kasus kecurangan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan yang tidak kalah pentingnya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh status WTP (wajar tanpa pengecualian) sebanyak dua kali berturut-turut di periode tahun 2008-2013 meskipun secara bertahap. Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan ketiga kinerja pemerintahan terbaik se-Indonesia.

Program Audit Internal dan Laporan Audit Internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Pada variabel Program Audit Internal (X_3) nilai t-hitung sebesar -0,385 lebih besar dari nilai t-tabel 2,018, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Program Audit Internal (X_3) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen penerapan *Good Government Governance* (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,702 maka dapat dinyatakan bahwa Program Audit Internal (X_3) yang dilaksanakan oleh Audit Internal tidak berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance* (H_3). Sedangkan, Pada variabel Laporan Audit Internal (X_5) nilai t-hitung sebesar 1,044 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,018, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Laporan Audit Internal (X_5) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen penerapan *Good Government Governance* (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,302 maka

dapat dinyatakan bahwa Laporan Audit Internal (X_5) yang dilaksanakan oleh Audit Internal tidak berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance* (H_5).

Hasil variabel ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amaliah (2014) menyatakan Peranan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good government governance*, hal ini terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan. Hasil yang sama juga didukung oleh Payangan (2016) hasil penelitiannya signifikan terhadap penerapan *good governance* pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Maros. Hasil penelitian Wahyunii (2013) juga membuktikan berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kasus-kasus kecurangan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan yang tidak kalah pentingnya yaitu Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh status WTP (wajar tanpa pengecualian) sebanyak dua kali berturut-turut di periode tahun 2008-2013 meskipun secara bertahap. Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan ketiga kinerja pemerintahan terbaik se-Indonesia.

Independensi, Kompetensi, Program Audit Internal, dan Laporan Audit Internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 8,124 dan signifikansi sebesar 0,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa F-hitung sebesar 8,124 lebih besar dari F-tabel 2,594, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen : Independensi (X_1), Kompetensi (X_2), Program audit internal (X_3) dan Laporan audit internal (X_5) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen penerapan *Good Government Governance* (Y).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *Good Government Governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumberdaya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah. Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

5.KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis data dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan mengenai Peranan Audit Internal terhadap Penerapan *Good Government Governance* di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Independensi dan Kompetensi secara signifikan berpengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance*. Sedangkan, variabel Program Audit Internal, Pelaksanaan Program Audit dan Laporan Audit Internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance*.
2. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Independen (X_1) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance* (Y).
3. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Kompetensi (X_2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance* (Y).
4. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Program Audit Internal (X_3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance* (Y).
5. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Program Audit (X_4) tidak realiable sehingga tidak diikutsertakan dalam pengujian regresi linier. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pelaksanaan Program Audit (X_4) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance* (Y).
6. Laporan Audit Internal (X_5) secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen penerapan *Good Government Governance* (Y).

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas Peranan Audit Internal terhadap Penerapan *Good Government Governance* di Provinsi Sumatera Selatan, penulis mencoba untuk mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Diharapkan Audit Internal di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memperbaiki kinerja dengan meningkatkan Program Audit Internal, Pelaksanaan Audit Internal dan Laporan Audit Internal agar penerapan *Good Government Governance* bisa di terapkan dengan baik.
2. Diharapkan penelitian berikutnya lebih representatif dalam menentukan sampel dan menambah variabel lain untuk mendukung serta melengkapi penelitian ini, demi menunjang hasil penelitian yang lebih baik dan lebih luas.

3. Penelitian selanjutnya lebih baik disertai dengan wawancara sebagai instrumen penelitian, sehingga kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih akurat dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, ItaRezki. 2014. Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Forbes APIP Sumsel :Efektifkan Peran Inspektorat Lewat Audit Charter. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/10042/0/Forbes-APIP-Sumsel-Efektifkan-Peran-Inspektorat-Lewat-Audit-Charter.bpkp> Diakses tanggal 27 maret 2017.
- Fitriany, NadyaSeptia. 2015. Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Bandung). *Jurnal*. Universitas Widyatama.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Mulyadi. 2008. *Auditing Edisi ke -6 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Payangan, Nita Ivana. 2016. Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan *Good Government Governance* Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Maros. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta : ANDI
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- TribunNews. 2016. Kejaksaan Agung Tetapkan Dua PNS Sumatera Selatan Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah dan Bansos. <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/31/kejaksaan-agung-tetapkan-dua-pns-sumatera-selatan-jadi-tersangka-korupsi-dana-hibah-dan-bansos>, Diakses 29 maret 2017.
- Wahyuni, Silvy. 2013. Analisis Peranan Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.